

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan fenomena yang selalu ada pada perekonomian di setiap negara. Inflasi terjadi di setiap negara, baik maju maupun berkembang. Gejala ekonomi ini tidak dapat dihilangkan. Beberapa upaya telah dilakukan guna menstabilkan inflasi di suatu negara tersebut. Inflasi yang juga merupakan sasaran akhir dalam kerangka kebijakan moneter mendapat cukup banyak perhatian, apabila inflasi ini akan menciptakan kestabilan harga sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dalam negeri.² Tingkat inflasi yang stabil akan berpengaruh kepada perekonomian yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yakni kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus. Pertama, Kenaikan harga, harga suatu komoditi dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya.³

² Wenny Elies Nur ; Fauziyah dan Hendry (Fakultas Ekonomi ;Universitas Negeri Surabaya) Cahyono, 'Pengaruh BI Rate dan Jumlah Uang yang Beredar Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Wenny Elies Nur Fauziyah Hendry Cahyono Abstrak', 2014, 1–9.

³ Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi) Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 360.

Kedua, bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Harga buah mangga harum manis di Jakarta, jika belum musimnya dapat mencapai Rp40.000,00 per kilogram. Namun, jika sudah musimnya, sekitar akhir tahun, dapat dibeli hanya dengan harga Rp20.000,00 per kilogram. Jadi harga mangga pada periode-periode tertentu akan mengalami kenaikan dua kali lipat, tetapi kenaikan mangga yang sangat tajam tersebut tidak menimbulkan inflasi, karena harga-harga komoditas lain tidak naik.⁴

Adanya inflasi juga dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, apabila inflasi yang terjadi di suatu negara bersifat ringan, hal ini akan dapat mendorong perekonomian lebih baik yaitu bisa meningkatkan pendapatan nasional sehingga orang semangat untuk bekerja, menabung dan melakukan investasi. Namun sebaliknya, jika kondisi perekonomian mencapai tingkat inflasi yang tinggi atau *hiperinflation* maka perekonomian akan menjadi kacau. Sehingga orang tidak akan bersemangat untuk bekerja, menabung atau melakukan produksi karena harga meningkat sangat cepat.⁵

⁴ Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi) Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 361.

⁵ *Ibid.*, hal. 361

Tabel 1.1
Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2016-2021

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
2016	3.02
2017	3.16
2018	3.13
2019	2.72
2020	1.68
2021	1.87

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Perkembangan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 3,16% yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 3.02%. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 3.13 %, 2.72%, dan 1,68%. Serta pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi 1.87%. Tabel tersebut menunjukkan tingkat inflasi pada tahun 2016-2021 mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup fluktuatif. Tentunya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tingkat inflasi mengalami kenaikan maupun penurunan tersebut.⁶ Salah satu faktor tersebut adalah pertumbuhan jumlah uang beredar di suatu negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya dalam pengendalian tingkat inflasi salah

⁶ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx> diakses pada 13 Juli 2023 pukul 09.00 WIB.

satunya dengan menerapkan perkembangan sektor keuangan yaitu pengendalian pertumbuhan jumlah uang beredar.⁷

Menurut konsep teori Keynes dalam inflasi didasarkan pada teori makronya. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya (*disposable income*). Sehingga, pertumbuhan jumlah uang beredar akan meningkat, pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi sering menjadi penyebab tingginya tingkat inflasi.⁸ Sedangkan menurut teori kuantitas yang diciptakan oleh Irving Fisher, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di waktu yang akan datang.⁹ Selain itu, Al-Maqrizi menggolongkan faktor penyebab terjadinya inflasi menjadi dua yaitu: inflasi alamiah (*natural inflation*) dan inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia (*human error inflation*), inflasi jenis ini di bagi lagi pada tiga bagian, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.¹⁰

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan non moneter menjadi faktor utama penyebab tingkat inflasi

⁷ Fani Andriani, Roni Mohammad, 'Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil', *Mutawazin : Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3.1 (2022), 1-5.

⁸ Agus Budi Santosa, "Analisis Inflasi di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3) 2017*, 2017, 445-52.

⁹ Novegya Ratih Primandari, "Inflasi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Kolegial*, 6.1 (2018), 57-67.

¹⁰ Syarifah Siregar dan T Masri, "Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi," *Mudharabah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2019), 60-67.

disebuah negara. Jumlah Uang Beredar (JUB) merupakan faktor utama penyebab inflasi di sebuah negara. Selanjutnya terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi melalui jumlah uang beredar seperti sertifikat bank. Sementara suku bunga dan juga nilai tukar terhadap mata uang asing juga menjadi faktor sekaligus pengaruh dari tingkat inflasi suatu negara.

Pertumbuhan jumlah uang beredar pada suatu negara menimbulkan perkembangan inflasi yang tinggi, sebaliknya rendahnya perkembangan pada jumlah uang beredar akan diikuti pada rendahnya laju inflasi. Menurut Dornbusch menjelaskan inflasi dianggap sebagai fenomena atau kejadian pada moneter dimana akan tidak berlangsung lama apabila hal tersebut tidak disertai oleh tingginya laju perkembangan jumlah uang beredar.¹¹ Hal ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan pada jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan pada inflasi.

Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M_1) dan dalam arti luas (M_2). M_1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M_2 meliputi M_1 , uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu

¹¹ P. harda Aprileven, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Yang Dimediasi Oleh Jumlah Uang Beredar," *Economics Development Analysis Journal*, 4.1 (2017), 32–41.

sampai dengan satu tahun.¹² M_1 adalah jenis jumlah uang yang likuiditasnya lebih tinggi dibandingkan dengan M_2 , sebab proses menjadikannya uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai.

Tabel 1.2

Data Jumlah Uang Beredar (M_1) periode tahun 2016-2021:

Tahun	Jumlah Uang Beredar (M_1)
2016	1 237 642.57
2017	1 390 806.95
2018	1 457 149.68
2019	1 565 358
2020	1 855 624.80
2021	2 282 200.26

Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Apabila dilihat dari tabel 1.2, perkembangan JUB M_1 pada tahun 2016 mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2021. JUB yang mengalami peningkatan tersebut tentunya akan berdampak pada kebijakan moneter di Indonesia. JUB akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengendalian tingkat inflasi selanjutnya yaitu Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), Politik Diskonto (*discount policy*), dan Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement ratio*).¹³ Bank Indonesia dapat

¹² <https://www.bi.go.id/> diakses pada Jumat, 30 September 2022 pukul 09.00 WIB

¹³ Safuridar, 'Peranan Instrumen Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh', dalam *Jurnal Samudera Ekonomika*, hal. 40

melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yang disebut dengan Operasi Moneter Syariah (OMS). Sebagaimana diamanatkan pada pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008.¹⁴

Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPTS) dan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. OPTS adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka OMS. OPTS dilakukan dengan cara jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi SBIS, SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.¹⁵ Sebagai instrumen kebijakan moneter syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dari tahun 2016-

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 212.

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

2021, SBIS mengalami perkembangan fluktuatif atau tidak stabil. Adapun perkembangan data SBIS dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah tahun 2016-2021

Dalam Satuan Miliar

Tahun	SBIS
2016	10.788
2017	10.017
2018	8.268
2019	10.386
2020	12.844
2021	225

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Perkembangan SBIS mengalami penurunan dari Rp. 10.788 milyar menjadi Rp. 10.017 milyar pada tahun 2017. Pada tahun berikutnya 2018 SBIS mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 8.268 milyar. Pada tahun 2019 hingga 2020 SBIS mengalami peningkatan mencapai Rp. 10.386 milyar hingga Rp.12.844 milyar. Serta pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 225 milyar. Perkembangan SBIS tersebut secara langsung dan tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

Ketika Bank Indonesia menerbitkan SBIS dan menjualnya pada masyarakat akan menyebabkan jumlah uang beredar dimasyarakat berkurang. Menurut Rahardjo dan Manurung menurunkan JUB adalah salah

satu target yang ingin dicapai dalam penetapan kebijakan kontraktif. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian berjalan terlalu kuat dan menyebabkan inflasi. Sehingga harapannya ketika JUB berkurang akan menekan permintaan masyarakat akan barang yang merupakan faktor penyebab terjadinya demand pull-inflation sehingga inflasi dapat ditekan.¹⁶

Kebijakan moneter selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi yakni Politik Diskonto (*discount policy*). Politik diskonto merupakan tindakan perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral yang harus dibayar oleh bank umum ketika bank umum meminjam dana dari Bank Sentral. Kebijakan menaikkan tingkat bunga akan menaikkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan bank umum dalam meminjam dana dari Bank Sentral sehingga keinginan Bank Umum untuk meminjam juga akan berkurang, dan selanjutnya juga akan mengurangi kredit yang disalurkan oleh Bank Umum yang akan menyebabkan berkurang jumlah uang beredar. Begitu juga sebaliknya, penurunan suku bunga oleh Bank Sentral akan menurunkan biaya meminjam dana sehingga semakin banyak bank umum yang ingin meminjam. Sehingga menyebabkan jumlah uang beredar akan bertambah.¹⁷ Suku bunga merupakan balas jasa yang diberi oleh pihak yang memberi pinjaman kepada yang meminjam dana atau uang. Menurut Sumiarni

¹⁶ Marisa Ayu Andarini and Tika Widiastuti, 'Pengaruh SBIS Dan PUAS Terhadap Tingkat Inflasi Melalui Operasi Moneter Syariah Pada Periode 2011-2015', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3.6 (2017), 474.

¹⁷ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 33

bahwa “tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Artinya jika tingkat suku bunga tinggi masyarakat lebih cenderung menggunakan uangnya untuk ditabung sehingga jumlah uang ditangan masyarakat berkurang”

Tabel 1.4

Data BI Rate periode 2016-2021 dapat diketahui pada tabel di bawah

ini:

Tahun	BI Rate (%)
2016	6,00
2017	4,56
2018	5,09
2019	5,63
2020	4,25
2021	3,5

Sumber: Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa suku bunga di Indonesia (*BI Rate*) mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,56%. Tahun selanjutnya berturut-turut mengalami kenaikan menjadi 5,09% pada tahun 2018 dan sebesar 5,63% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Bank Sentral menurunkan suku bunganya berturut-turut menjadi 4,25% dan 3,5%. Sifat dinamis suku bunga tersebut akan memberikan dampak terhadap sektor moneter maupun sektor riil. Pada sektor riil digambarkan apabila suku bunga naik maka akan menyulitkan investasi sedangkan pada sektor moneter suku bunga tinggi akan merangsang

pertumbuhan tabungan masyarakat. Ke depannya pertumbuhan tabungan masyarakat tersebut akan memberikan dampak pengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara yang menerapkan kerangka kebijakan moneter dapat menggunakan transmisi melalui jalur suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Melalui transmisi jangka pendek yang pada gilirannya akan mempengaruhi suku bunga jangka menengah hingga terwujudnya sasaran akhir, yakni inflasi. Suku bunga SBI sebagai suku bunga jangka pendek yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang yang beredar dan pada gilirannya akan mampu mengendalikan tingkat harga.¹⁸ Suku bunga yang tinggi dapat mendorong investor untuk menanamkan modal ke bank daripada memnginvestasikan pada sektor riil yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan.¹⁹

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat inflasi yakni nilai tukar. Bank Indonesia mendefinisikan nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs merupakan harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kurs menggambarkan aktivitas perekonomian yang bersifat terbuka atau keterbukaan perekonomian suatu

¹⁸ Perry Warjiyo dan Doddy Zulverdi, 'Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia', *Buletin Ekonomi dan Perbankan*, hal. 29

¹⁹ Perry Warjiyo dan Doddy Zulverdi, *Penggunaan Suku Bunga Sebagai...*, hal. 30

negara. Hal ini disebabkan karena kurs menjadi alat pembayaran utama dalam kegiatan transaksi luar negeri baik itu ekspor maupun impor. Perbedaan harga nilai mata uang membuat permintaan akan barang juga berubah karena harga barang otomatis akan ikut berubah. Perubahan harga ini lah yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya inflasi. Kurs memainkan peranan yang amat penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama.²⁰

Tabel 1.5
Data nilai tukar mata uang asing (US Dollar) terhadap rupiah periode 2016-2021

Tahun	Kurs Tengah Mata Uang Asing (US Dollar) Terhadap Rupiah
2016	13,436,00
2017	13,548,00
2018	14,481,00
2019	13,901,00
2020	14,105,00
2021	14,340,35

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan pada tabel 1.5 dapat diketahui bahwa nilai tukar setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif.

²⁰ Pawan Darasa Panjaitan, Elidawaty Purba, dan Darwin Damanik, 'Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara', Jurnal Ekuilnomi, 3.1 (2021).

Penurunan nilai tukar mata uang dapat menyebabkan biaya impor barang ke dalam negeri menjadi lebih mahal.²¹ Hal ini akan menyebabkan naiknya harga barang secara sepihak dikarenakan naiknya biaya bahan pokok. Apabila biaya bahan pokok semakin naik, maka dapat mengakibatkan turunnya daya beli pada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mempengaruhi jumlah uang yang beredar pada masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat inflasi.

Inflasi telah menjadi masalah perekonomian di Indonesia sejak lama dimana fenomena inflasi ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga terus meningkat yang selanjutnya pendapatan riil masyarakat terus tergerus karena harga barang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun. Situasi ini akan membuat kebutuhan masyarakat kurang tercukupi, dan berakhir kesejahteraan masyarakat pada suatu negara akan menurun.²² Pemerintah selaku penyusun kebijakan tidak akan diam saja. Berbagai upaya dilakukan demi pengendalian inflasi agar tidak terjadi kenaikan pada periode berikutnya, terutama pengendalian tingkat inflasi melalui faktor yang telah disebutkan diatas.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Novaldo Yanescha Putra, pada penelitiannya menyebutkan bahwa dengan makin menipisnya jumlah

²¹ Pawan Darasa Panjaitan, Elidawaty Purba, dan Darwin Damanik, *Pengaruh Jumlah Uang Beredar...*, hal. 7

²² <https://www.bi.go.id/> diakses pada Minggu, 7 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

uang yang dimiliki pada masyarakat membuat keinginan masyarakat untuk berbelanja terus mengalami penurunan. Jika hal ini berkepanjangan dalam periode yang lama, maka akan mengakibatkan laju inflasi yang kian terus meningkat.²³ Menjaga inflasi tidak bisa terwujud apabila hanya dilakukan penetapan kebijakan moneter saja, tetapi pemerintah harus melihat sisi dari kebijakan fiskal, sektor riil, dan kebijakan ekonomi yang berlaku yang bisa dijadikan patokan dan difokuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukannya koordinasi dari pemerintah terutama bank Indonesia untuk selalu menargetkan sasaran, pengawasan, dan pengendalian akan inflasi.²⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik mengkaji mengenai topik **“Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dijabarkan dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Uang Beredar memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat inflasi?

²³ Novaldo Yanescha Putra, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2020,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2.5 (2022), 195–212 <<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.183>>.

²⁴ Novaldo Yanescha Putra, ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2020’, *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.5 (2022), 195–212.

2. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat inflasi?
3. Apakah BI Rate memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat inflasi?
4. Apakah nilai tukar memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat inflasi?
5. Apakah Jumlah Uang Beredar, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate dan nilai tukar memiliki pengaruh secara simultan terhadap inflasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap tingkat inflasi.
2. Untuk menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap tingkat inflasi.
3. Untuk menguji pengaruh BI Rate terhadap tingkat inflasi.
4. Untuk menguji pengaruh nilai tukar terhadap tingkat inflasi.

5. Untuk menguji pengaruh secara simultan Jumlah Uang Beredar, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate dan nilai tukar terhadap tingkat inflasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan keilmuan mengenai pengaruh Jumlah Uang Beredar, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate, dan Nilai Tukar terhadap Inflasi melalui Jumlah Uang Beredar. Serta bisa digunakan untuk literatur penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk pemerintah dalam mengkaji mengenai tingkat inflasi serta mengambil keputusan dalam menyusun rencana agar tingkat inflasi tumbuh stabil pada periode selanjutnya.

- b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi salah satu media pembelajaran dan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan lapangan serta menambah kepustakaan untuk dijadikan referensi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya, maupun memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan penelitian yang lebih komprehensif tentang kebijakan moneter sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia, Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi berikutnya.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini terarah dan jelas. Penelitian ini akan dibatasi pada analisis pengaruh Jumlah Uang Beredar, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI Rate dan Nilai Tukar terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 2016-2021. Jadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah tingkat inflasi di Indonesia dengan rentang waktu antara 2016 sampai dengan 2021, dengan kemungkinan variabel-variabel jumlah uang beredar,

sertifikat bank indonesia syariah, BI rate, dan nilai tukar yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau variabel independen yang digunakan hanya empat variabel yaitu jumlah uang beredar, sertifikat bank indonesia syariah, BI rate, dan nilai tukar. Sehingga kemungkinan masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Pada penelitian ini hanya memasukkan penelitian hingga tahun 2021 dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber data.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan definisi dari beberapa istilah kunci dalam skripsi ini, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Inflasi (Y)

Menurut Sukirno inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah. Inflasi secara umum dianggap sebagai masalah penting yang harus diselesaikan

dan sering menjadi agenda utama politik dan pengambilan kebijakan.²⁵

b. Jumlah Uang Beredar (X1)

Menurut Pohan pengertian paling sempit atau biasa dikenal dengan istilah *narrow money* adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran atau dapat diperluas mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati “uang” (deposito berjangka dan tabungan). Dalam hal ini tentu uang telah memenuhi fungsinya sebagai *medium of exchange*.²⁶ Namun definisi ini terus berkembang, seiring dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Cakupan definisi jumlah uang beredar di negara maju umumnya lebih luas dan kompleks dibandingkan negara sedang berkembang (NSB).²⁷

c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (X2)

Menurut Rifanto Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh

²⁵ Afrizal Afrizal, “Analisis Inflasi di Indonesia (Suatu Pendekatan Model Dinamik),” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 7.2 (2018), 85 <<https://doi.org/10.26418/jebik.v7i2.24199>>.

²⁶ Susmiati Susmiati, Ni Putu Rediatni Giri, dan Nyoman Senimantara, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2018,” *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4.2 (2021), 68–74 <<https://doi.org/10.22225/wedj.4.2.2021.68-74>>.

²⁷ Susmiati Susmiati, Ni Putu Rediatni Giri, and Nyoman Senimantara, ‘Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 2011-2018’, *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 4.2 (2021), 68–74.

pihak Bank Indonesia sebagai kebijakan mengatur kelebihan dana likuiditas perbankan syariah. SBIS adalah surat berharga berlandaskan prinsip-prinsip syariah, berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengupayakan efektivitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah meningkat.²⁸

d. BI Rate (X3)

Menurut Raharjo dan Elida BI rate adalah suku bunga kebijakan BI yang mencerminkan sikap (stance) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI rate diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjadikan acuan di dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.²⁹

²⁸ Rindani Dwihapsari, Mega Rachma Kurniawati, and Nurul Huda, 'Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2013-2020', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 980–93.

²⁹ (Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta) Saridawati, 'Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Bi) Rate Terhadap Nilai Tukar Us\$ Dan Inflasi', *Moneter*, II.1 (2015), 132–41.

e. Nilai Tukar (X4)

Aristoteles mendefinisikan nilai tukar (*value in exchange*) adalah sebagai kemampuan dari barang untuk dilakukan pertukaran dengan barang lainnya di pasar. Nilai mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.³⁰

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai petunjuk bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari jumlah uang beredar (X_1), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (X_2), Bank Indonesia Rate (X_3), dan nilai tukar (X_4) terhadap tingkat inflasi (Y) di Indonesia tahun 2016-2021. Data yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia, BPS dan OJK.

³⁰ (Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta) Saridawati, '*Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Bi) Rate Terhadap...*', hal. 69.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibuat sedemikian rupa agar kedepannya terdapat kejelasan dalam pembahasan masalah, untuk itulah disusun sistematika yang terdiri 6 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah judul yang berkaitan dan sistematika penulisannya. Bab ini berisi mengenai hal-hal pokok yang dapat dijadikan patokan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan judul yang didapatkan dari berbagai referensi guna mendukung penelitian. Teori inflasi, jumlah uang beredar, sertifikat bank indonesia syariah BI rate, dan nilai tukar. Dalam bab ini juga membahas penelitian terdahulu untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi, teknik sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data dan juga pengujian hipotesis serta hasil temuan dari penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang deskriptif variabel penelitian yang digambarkan melalui tabel yang akan memperlihatkan masing masing variabel tiap priode. Selanjutnya penelitian ini menjabarkan hasil analisis data yang diolah dengan bantuan program komputer *SPSS Ver. 23*.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil pembahasan setiap variabel dan hubungan antara penelitian dengan teori maupun studi empiris/tinjauan yang telah diteliti dan diolah oleh peneliti.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang menguraikan akhir dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di atas.dari peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini.